

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN
BENCANA BANJIR DAN GENANGAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOH. HISYAM MAULANA
NIM : 1517041

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. HISYAM MAULANA
NIM : 1517041
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2020-2040
DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN
BENCANA BANJIR DAN GENANGAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER
AUDA (STUDI KASUS KECAMATAN SIWALAN,
KABUPATEN PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Desember 2022

Yang Menyatakan,



MOH. HISYAM MAULANA
NIM.1517041

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Moh. Hisyam Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
di PEKALONGAN

Assalamualaikum w.w.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

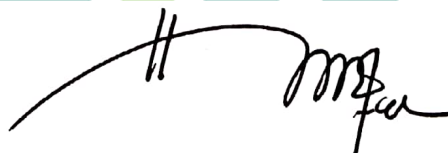
Nama : MOH. HISYAM MAULANA
NIM : 1517041
Jurusan : Hukum Tatanegara
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2020-2040
DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN
BENCANA BANJIR DAN GENANGAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KECAMATAN
SIWALAN)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum w.w.

Pekalongan, 9 Desember 2022
Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.198504052019032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Moh. Hisyam Maulana
NIM : 1517041
Judul Skripsi : **Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Genangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

NIP. 196506211992031002

Penguji II



Yunas Derja Luluardi, M.A

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		آ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis

fatimah

4. *Syaddad* (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

Ditulis

rabbana

البر

Ditulis

al-bir

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس

Ditulis

asy-syamsu

الرجل

Ditulis

ar-rajulu

السيدة

Ditulis

as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر

Ditulis

al-qamar

البديع

Ditulis

al-badi'

الجلال

Ditulis

al-jalil

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof ' / '.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan. Dengan segenap usaha penulis panjatkan kehadiran Allah SWT oleh karena-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.

Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan karya ilmiah skripsi ini untuk :

1. Kedua orangtuaku (Ibu Nurul Hidayah dan Bapak Harimulyanto) atas segala perjuanganmu akan selalu teringat dan terekam jelas dihati dan dipikiranku yang senantiasa tabah dan gigih memberikan semangat yang tiada tanding dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan anakmu ini. dan Saudara kandungku (M. Salman dan Rahmi Nur Mulia) yang turut serta mendukung langkahku untuk meraih kesuksesan.
2. Saudara Fatkhul Mubaligh Lancur Azim yang senantiasa turut bertukar pikir dengan penulis untuk berjuang menyelesaikan penelitian skripsi sebagai mahasiswa akhir dalam memberikan dukungan spirituil serta motivasi kepada penulis. Tak lupa juga Anggraeni Triyas Sekarwati yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesahku dan senantiasa membantuku dikala suka dan duka, Zerolens studio yang selalu mau memberikan tempat untuk berpikir dalam pengerjaan penelitian.

3. Sahabat mahasiswa angkatan 2017 Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang penulis pernah temui (yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu) yang mau memberikan berbagai varian pengalaman dan pembelajaran dibangku perkuliahan dulu hingga saat ini.



MOTTO

“Akan selalu ada mekar bunga bagi mereka yang ingin merawatnya.”

-Henri Matisse-



ABSTRAK

MOH. HISYAM MAULANA (1517041), 2022, IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2020-2040 DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN GENANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KECAMATAN SIWALAN)

Dosen pembimbing : Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Skripsi ini dilatarbelakangi terkait adanya fenomena bencana banjir dan genangan rob yang terjadi di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Dampak yang terjadi dari bencana tersebut kerap menimbulkan beberapa keresahan di lintas sektor pada masyarakat setempat. Melihat fenomena yang demikian, peneliti terbesit suatu ide untuk melakukan sebuah penelitian yang menitikberatkan pada upaya penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemkab Pekalongan terhadap fenomena banjir dan genangan yang terjadi di Kecamatan Siwalan. Melalui Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang RTRW 2020-2040 peneliti dapat menjadikannya sebagai acuan dari implementasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Pekalongan. Selain itu, dengan ditentukannya regulasi tersebut yang difokuskan pada implementasi kebijakannya peneliti juga tertarik untuk menelusuri dari segi keislaman yakni dalam konsep maqashid syariah. Sebab, upaya tentang penanganan fenomena banjir dan genangan juga erat kaitannya dengan kemaslahatan lingkungan dalam ruang lingkup maqashid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Yangmana data-data yang digunakan peneliti sumber utamanya berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data bersifat kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan secara deskriptif yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Pada pisau bedah analisisnya peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dan maqashid syariah. Hasil penelitian berdasarkan Teori implementasi kebijakan milik Van Horn dan Van Meter yakni dapat dikatakan berhasil, akan tetapi terdapat hal yang menjadi penghambatnya yakni terkait penggunaan sumber daya finansial yang dialihkan untuk dana Covid-19 sehingga dalam penggarapannya mundur. Adapun hasil penelitian ini menurut teori maqashid syariah yang diusung Jasser Auda yakni terletak pada fitur kebermaksudan dari program-program kebijakan yang disusun pemerintah memiliki maksud penjagaan terhadap lingkungan alam, yang rusak akibat bencana banjir dan genangan yang melanda Di Kecamatan Siwalan melalui pembangunan infrastruktur fisik.

Kata Kunci : Penanganan Banjir dan Genangan, Kecamatan Siwalan, Implementasi Kebijakan, dan Maqashid Syariah.

ABSTRACT

MOH. HISYAM MAULANA (1517041), 2022, IMPLEMENTATION OF PEKALONGAN REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING 2020-2040 REGIONAL SPATIAL PLANNING IN THE MANAGEMENT OF FLOOD AND INFLOW DISASTER PRONE AREAS WITH THE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE (CASE STUDY IN SIWALAN DISTRICT)

Supervisor : Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

The background of this thesis is related to the phenomenon of floods and tidal inundation that occurred in Siwalan District, Pekalongan Regency. The impact of the disaster often creates several cross-sectoral problems in the local community. Seeing this phenomenon, the researcher came up with an idea to conduct a study that focuses on what efforts can be made by the Pekalongan Regency Government to deal with the phenomenon of flooding and inundation that occurred in Siwalan District. Through the District Regulation. Pekalongan No. 3 of 2020 concerning the RTRW 2020-2040 researchers can use it as a reference for the implementation carried out by the Pekalongan Regency Government. In addition, with the determination of these regulations which focus on implementing policies, researchers are also interested in exploring from an Islamic perspective, namely in the concept of maqashid sharia. This is because efforts to deal with the phenomenon of flooding and inundation are also closely related to environmental benefits within the scope of maqashid sharia.

The type of research used in this study is empirical juridical. Where the data used by researchers is the main source of interviews, observation and documentation. The method used in collecting data is qualitative. The analysis technique is carried out descriptively which includes data presentation, data reduction, and drawing conclusions.

In the scalpel analysis, the researcher used the theory of policy implementation and maqashid sharia. The results of the research are based on Van Horn and Van Meter's theory of policy implementation, which can be said to be successful, but there are things that hinder it, namely the use of financial resources diverted for Covid-19 funds so that the cultivation is backwards. The results of this study according to the theory of maqashid sharia which is carried out by Jasser Auda lies in the meaningful features of the policy programs compiled by the government which have a purpose for the natural environment, which was damaged by the floods and inundations that hit Siwalan District through the development of physical infrastructure.

Keywords: Flood and Inundation Handling, Siwalan District, Policy Implementation, and Maqashid Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi segala kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-2040 Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Genangan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)”. Dan menjadikannya sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis sampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Drs. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen wali studi yang turut memberikan sumbangsih ilmu, strategi, dan motivasi.

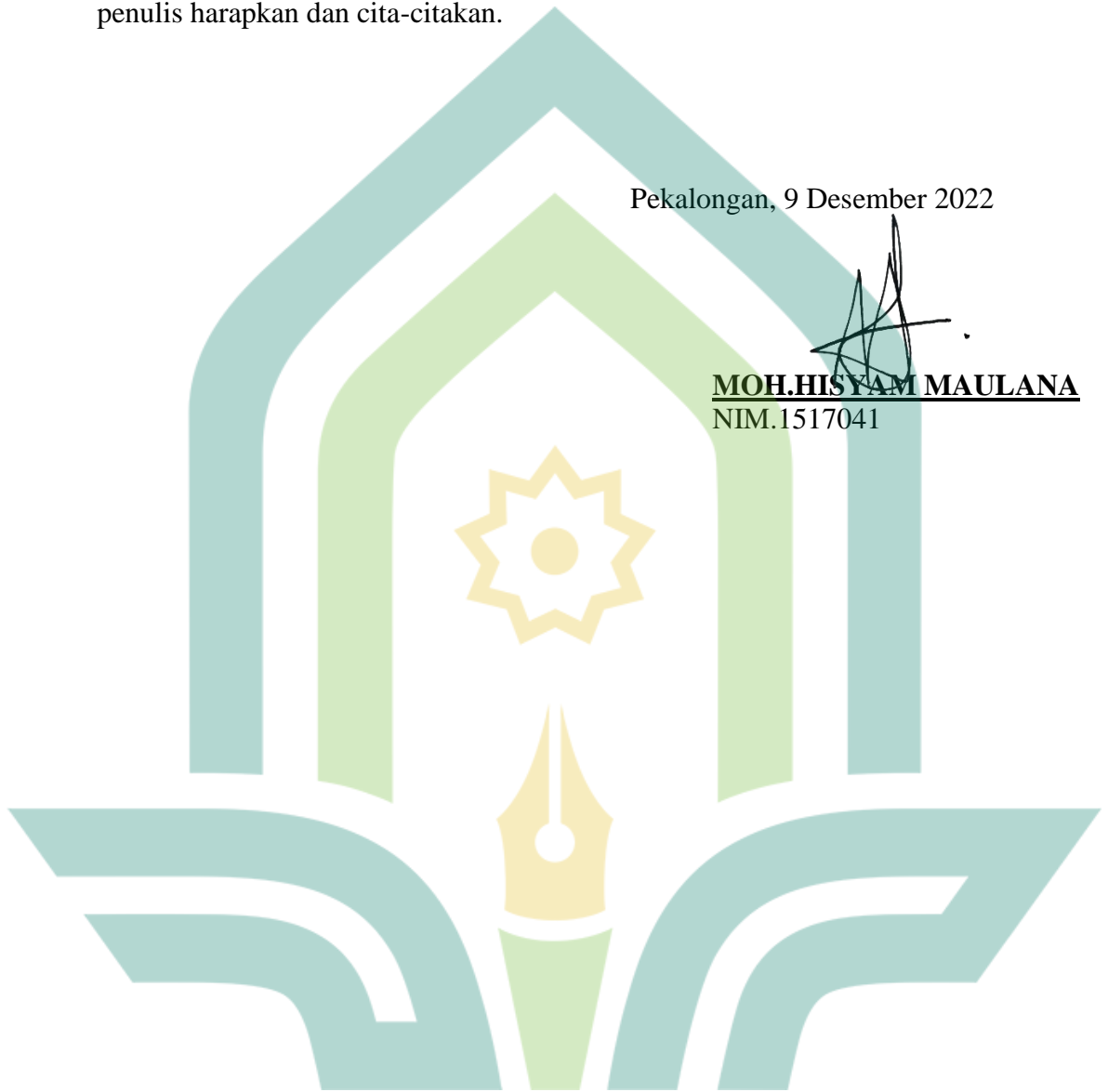
6. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan karya ilmiah skripsi.
7. Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan pada Sidang Munaqosyah Penulis.
8. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan pada Sidang Munaqosyah Penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tatanegara atas pemberian ilmu, wawasan, dan pengalaman selama proses interaksi berlangsung dengan penulis sampai saat ini.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
11. Bapak Siswanto selaku Kepala Kecamatan Siwalan yang berpartisipasi
12. Bapak Budi Antoyo selaku Kepala Bidang PSDA Dputaru Kab. Pekalongan yang berpartisipasi.
13. Bapak Teguh Wuryono selaku staf Bidang PSDA Dputaru Kab. Pekalongan yang berpartisipasi.
14. Bapak Turino selaku warga Kecamatan Siwalan yang berpartisipasi.
15. Bapak Bambang selaku warga Kecamatan Siwalan yang berpartisipasi.
16. Bapak Suprayitno selaku warga Desa Depok yang turut berpartisipasi.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis pada segala hal yang berkaitan pada proses penelitian ini.

Tentu penulis menyadari, bahwa karya ilmiah skripsi ini jauh dari sempurna. Maka dari itu dengan setulus hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran akan selalu terbuka lebar demi kesempurnaan pada penelitian ini. kebermanfaatan karya ilmiah ini kepada banyak pihak akan selalu penulis harapkan dan cita-citakan.

Pekalongan, 9 Desember 2022



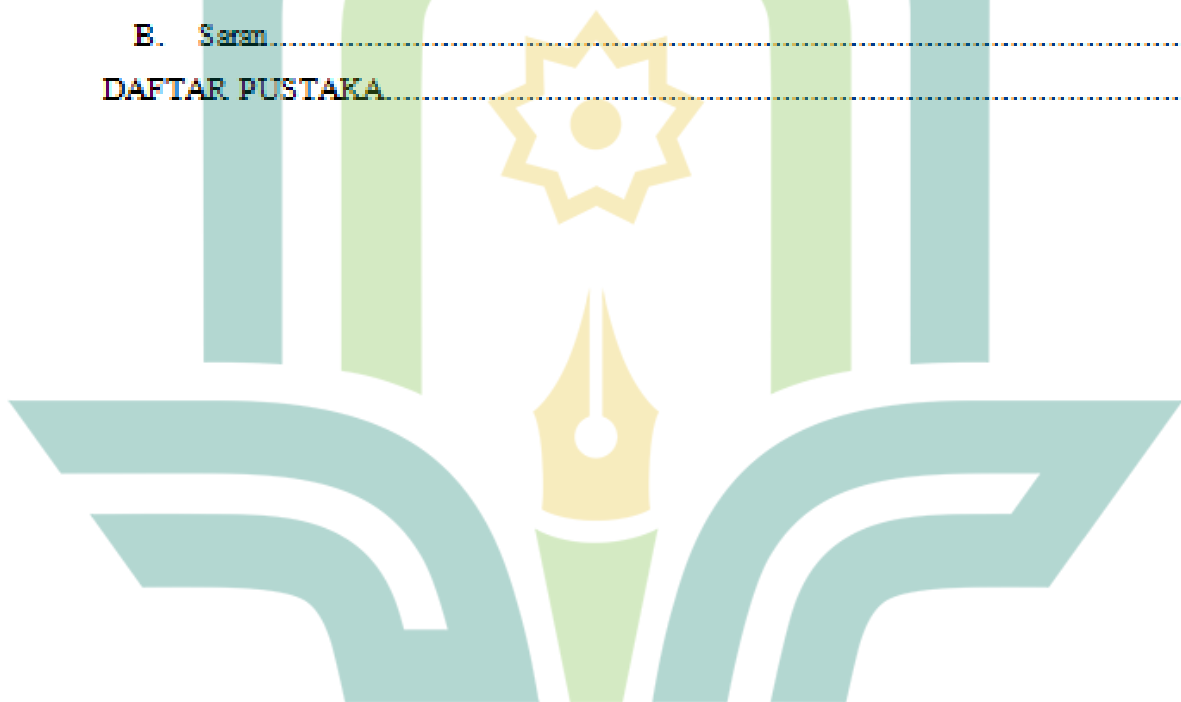
MOH.HISYAM MAULANA
NIM.1517041



DAFTAR ISI

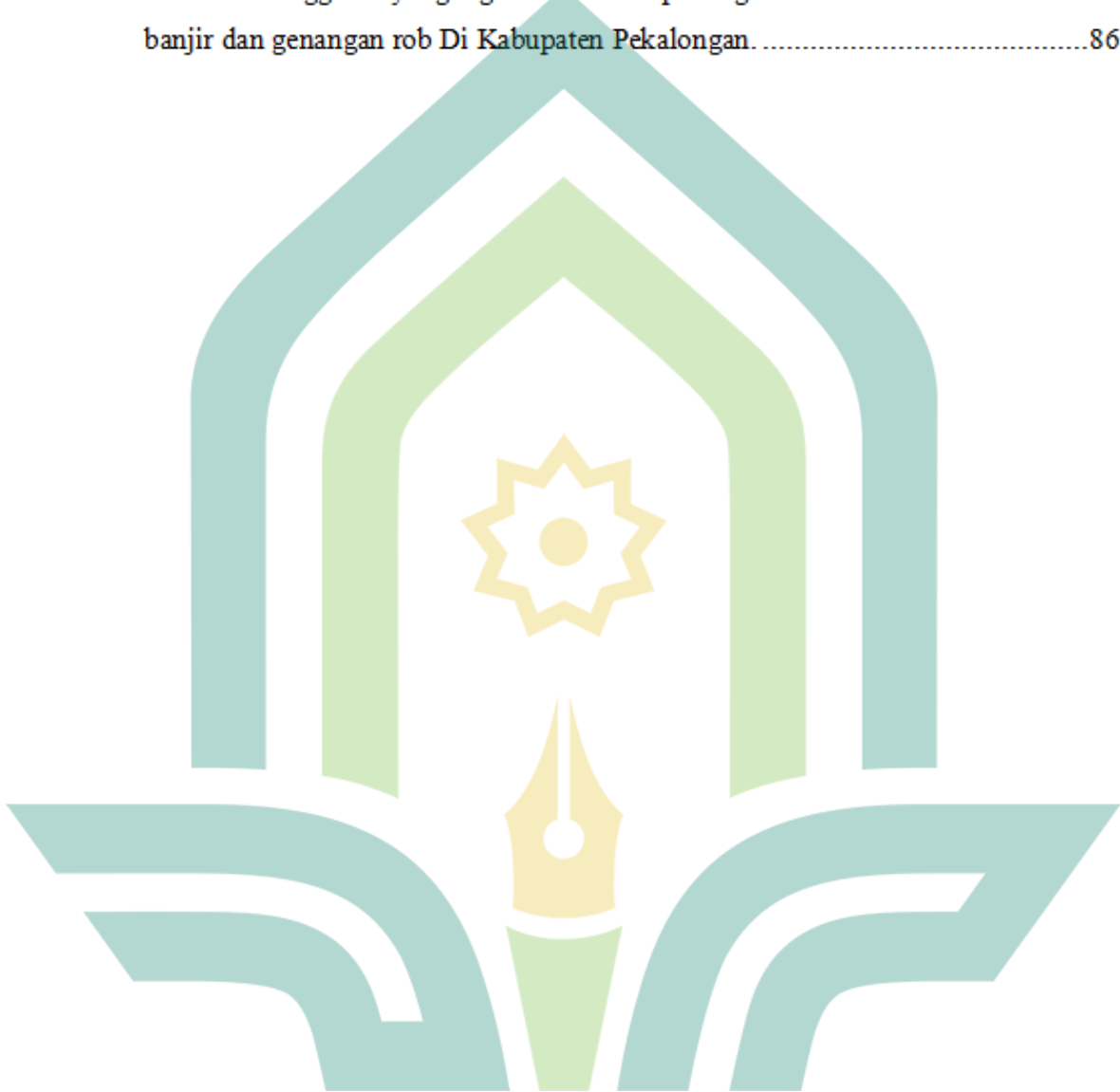
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN MAQASHID SYARIAH.....	23
A. Teori Implemenasi Kebijakan.....	23
B. Teori Maqashid Syariah.....	34
BAB III PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN GENANGAN DI KECAMATAN SIWALAN.....	52
A. Gambaran umum Kecamatan Siwalan.....	52
B. Gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan.....	64
C. Peran Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan Berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan.....	67

BAE IV ANALISIS PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN GENANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	77
A. Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RTRW Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Genangan Di Kecamatan Siwalan Menurut Teori Van Horn dan Van Meter	77
B. Faktor Penghambat Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Genangan Di Kecamatan Siwalan	103
C. Pandangan Maqashid Syariah Jasser Auda Dalam Penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob Di Kecamatan Siwalan.....	105
BAE V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pasal yang berkaitan Penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan.....	74
Tabel 4.1 Standar dan Tujuan Kebijakan dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan yang sedang dicapai dan belum tercapai.	81
Tabel 4.2 Anggaran yang digunakan untuk penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob Di Kabupaten Pekalongan.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi & Tata Kerja Kecamatan Siwalan.....	55
Gambar 3.2 Peta Kecamatan Siwalan.....	57
Gambar 3.3 Peta Kerawanan Bencana Kabupaten Pekalongan.....	59
Gambar 3.4 Genangan rob sungai silempeng, Desa Boyoteluk, Kecamatan Siwalan.....	60
Gambar 3.5 Akses jalan di Desa Rembun, Desa Boyoteluk, dan Desa Depok, Kecamatan Siwalan.....	61
Gambar 3.6 Foto genangan rob di kawasan pertambakan Depok-Blacanan, Kecamatan Siwalan.....	62
Gambar 3.7 Jembatan Penghubung Desa Boyoteluk dan Desa Depok diatas Sungai Pait (Sragi Lama).....	62
Gambar 3.8 Jembatan Penghubung Desa Blimbingwuluh-Tengengwetan putus akibat arus deras di Sungai Pait(Sragi lama).....	63
Gambar 4.1 Pembangunan awal tanggul pengendalian banjir Di Desa Depok Kecamatan Siwalan.....	81
Gambar 4.2 Pola aktifitas dan komunikasi antar lembaga secara vertikal menurut Teori Van Hom & Van Meter.....	90
Gambar 4.3 Pola aktifitas dan komunikasi antar lembaga secara Horizontal menurut teori Van Hom & Van Meter.....	90
Gambar 4.4 Struktur birokrasi pada pelaksanaan pembangunan tanggul banjir Di Desa Depok, kec. Siwalan.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing	126
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	127
Lampiran 3 Lembar Bukti Pengganti Surat Izin Penelitian Yang Dikeluarkan Oleh Bappeda Kabupaten Pekalongan	128
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan mengeluhkan tentang adanya bencana banjir dan genangan rob yang melanda di wilayahnya. Hal ini diperkuat pemberitaanya dari ungkapan salah satu warga Desa Depok Bapak Turino selaku tokoh masyarakat, beliau menyampaikan bahwa bencana banjir dan genangan rob yang berangsur-angsur terjadi Di Kecamatan Siwalan merupakan fenomena bencana yang kerap menyisakan kerusakan infrastruktur yang begitu parah di wilayah Kecamatan Siwalan¹.

Kasus bencana banjir yang terjadi pada bulan Februari 2022 pada saat peristiwa hujan lebat selama hampir dua hari berturut-turut, menjadikan drainase yang menuju Sungai Pait tidak berfungsi dengan optimal sehingga hampir seluruh wilayah desa yang berada didekat (DAS) di Kecamatan Siwalan terdampak banjir tersebut. Tidak hanya itu, air kiriman yang datang dari selatan menuju utara melalui Sungai Pait (Sragi lama) yang arusnya sangat besar juga menyebabkan jembatan penghubung antara Desa Blimbingwuluh dengan Tengeng Wetan menjadi putus. Adapun fasilitas umum yang juga ikut terdampak seperti Mushola dan Sekolah sekitar lebih dari Tiga Puluh (30) Bangunan².

¹ Wawancara bersama Bapak Turino pada 2 Oktober 2022

² <https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/02/07/13-desa-di-siwalan-pekalongan-terendam-banjir?page=2> diakses 7 Maret 2022 pukul 07:30 WIB

Berdasarkan catatan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) telah menyebutkan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 24 Februari 2022 bencana yang kerap melanda negara ini adalah banjir yaitu sebanyak 358 kasus³. Menurut Kristianto (2010), Banjir merupakan fenomena naiknya volume air yang lebih banyak dari kapasitas daya tampung dari beberapa sumber dan tempat penyaluran air sehingga menimbulkan luapan air yang kemudian air yang tidak tertampung mengalir dan merendam dataran yang lebih rendah, secara umum daerah yang berpotensi banjir semacam itu dapat terjadi di daerah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan di daerah pesisir pantai, sewaktu air laut mengalami pasang diiringi dengan kondisi daerah pesisir yang biasanya memiliki tingkat elevasi yang rendah akan mengakibatkan disfungsi drainase sehingga menimbulkan fenomena genangan (rob)⁴.

Selain itu pada kasus bencana genangan (rob) di kabupaten pekalongan, Kecamatan Siwalan adalah daerah yang terdampak dari bencana endemik tersebut karena dari letak wilayahnya Kecamatan Siwalan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa pada sebelah utara⁵, hal tersebut juga yang menjadikan faktor pendukung untuk terjadinya fenomena genangan (rob). Kondisi Kecamatan Siwalan yang demikian cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat setempat akibat isu pemanasan global yang diperparah dengan adanya penurunan permukaan tanah dan abrasi yang terjadi di pesisir

³ <https://gis.bnpb.go.id> diakses 15 Maret 2022 Pukul 13:00 WIB

⁴ Kristianto, A, "Seri Tanggap Bencana Alam Banjir", (Bandung: Angkasa,2010).

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Siwalan,_Pekalongan diakses 4 Maret 2022 Pukul 15:00 WIB

pantai⁶. Meskipun sejak tahun 2019 sudah dibangun tanggul dan *long storage*, akan tetapi masih saja memunculkan beberapa permasalahan, salah satunya wilayah yang berada di luar jangkauan tanggul dan *long storage* yang semakin megkhawatirkan dan terancam tenggelam seperti lahan sawah, lahan tambak, lahan budidaya ternak yang berada di Desa Boyoteluk dan Desa Depok. Sebagian besar desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Siwalan terletak di sepanjang sungai dan pesisir pantai. Desa Boyoteluk, Depok, dan Blacanan merupakan desa yang terletak tepat berada di wilayah pantai. Desa Blimbingwuluh, Yosorejo, Siwalan, dan Pait merupakan desa/kelurahan yang berdekatan dengan Sungai Pait. Atas dasar itu, maka wilayah Kecamatan Siwalan ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir dimasa musim penghujan dan genangan air (rob) dimasa permukaan air laut naik.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, dalam rangka menangani bencana banjir dan genangan rob yang terjadi di Kecamatan Siwalan, maka Pemkab Pekalongan dapat melaksanakan penanganannya dengan tujuan pengentasan bencana banjir dan genangan rob dari aspek pembangunan dan infrastrukturnya yang sudah ditentukan pada Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu terobosan untuk menangani berbagai persoalan lingkungan terutama banjir dan genangan yang

⁶ Nashrullah. S. Dkk, "Study on Flood Inudation in Pekalongan, Central Java", (Jurnal Internasional Pengetahuan Bumi dan Penginderaan Jauh, Vol. 10, No. 2, 2013)

mana dilakukan oleh pemkab pekalongan melalui Dputaru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan problematika tentang banjir dan genangan rob. Karena kesejahteraan masyarakat bukan saja berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Akan tetapi disini termasuk dalam arti luas yang meliputi semua pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rasa aman dari dampak banjir dan genangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan dapat mengancam nyawa. Pemerintah daerah membiarkan masyarakat terus menerus menghadapi dampak dari bencana tersebut yang akan berulang setiap tahun bahkan setiap saat. Berarti pemerintah dapat dikatakan membiarkan berlangsungnya kemudhorotan masyarakat, sebaliknya pemerintah melakukan usaha dalam penanganannya mulai dari penyusunan perda sebagai fungsi regulasi atau pelayanan berbagai kebutuhan penanganan banjir seperti pembangunan tanggul dan penataan drainase hingga pemenuhan kebutuhan darurat ketika menghadapi bencana banjir dan genangan (rob) adalah langkah mewujudkan fungsi pemerintah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Agama Islam sangat memperhatikan kemaslahatan masyarakat dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam islam menjangkau urusan agama, keamanan, kesehatan mental, ekonomi dan rasa penghormatan pada sesama manusia yang berlatarbelakang sangat plural. Islam sejatinya memiliki tujuan dasar yakni *Rahmatan lil 'alamin* atau dapat memberikan cintakasih kepada seluruh alam semesta. Islam telah memiliki teori yang cukup mapan bagi pengukuran kemaslahatan-kemaslahatan baru apakah sesuai dengan islam atau tidak. Teori itu biasa dikenal dengan teori Maqashid Syariah. Tolok ukur

kemaslahatannya mendasarkan pada sumber nash alquran dan hadist yang dapat menjangkau secara luar kemaslahatan baru sekaligus bisa membedakannya dari kemaslahatan semua yang tidak sesuai syariah. Dengan begitu, wajar apabila islam memiliki pedoman yang sempurna bagi umat manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatur, mengelola, memanfaatkan, menjaga, dan melindungi alam sebagai sumber penghidupan agar tidak terjadi kerusakan atau kepunahan. Berkaitan dengan fenomena bencana banjir dan genangan yang terjadi Di Kec. Siwalan, tentu hal tersebut merupakan sebuah ancaman yang harus dibenahi manusia yang dimotori oleh pemerintah daerah demi menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakat siwalan.

Maka dari itu, Agama Islam dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan terkait upaya penanganan bencana banjir dan genangan (rob). Jadi secara garis besarnya, Islam telah memiliki basis tersendiri dalam penyelesaiannya terkait upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah⁷.

Untuk menyelesaikan problematika yang semacam itu, agama islam mampu menghadirkan konsep maqashid syariah yang sudah dirumuskan oleh para ulama pada masa lampau yang bertumpu pada lima kebutuhan dasar kemaslahatan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Akan tetapi konsep maqashid syariah juga harus dielaborasi dengan kondisi zaman dan konteks permasalahan yang ada. Dengan menginterkoneksi paradigma maqashid

⁷ Ubaidillah Hasan, "Fiqh Bi'ah", (Jurnal Al Qanun, Vol.13, No.1, 2010)

syariah terhadap konsep fiqih lingkungan (*Bi'ah; Enviroment*)⁸ yang disandarkan dengan Al Quran&Hadis dan berbasis pada kecerdasan akal sebagai alat dalam berfikir, tentu hal ini dapat memberikan eksistensi konsep maqashid syariah yang mampu berdaya guna dan mampu berkontribusi melalui pemikiran untuk menjawab persoalan tentang bencana yang mengakibatkan terganggunya hajat masyarakat⁹.

Berdasar pada uraian diatas, maka dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan judul **“Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir Dan Genangan Di Kecamatan Siwalan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 dan faktor penghambatnya dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan di Kec. Siwalan?
2. Bagaimana pandangan maqashid syariah dalam penanganan kawasan rawan bencana banjirdan genangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai rumusan masalah diatas yakni:

⁸ Konsep interkoneksi disini merupakan kelanjutan dalam menyempurnakan konsep masalahah *al kulliyat al khamis* oleh para ulama di masa lampau. Periksa Halil Tahrir, “Ijtihad Maqashidi”, (Yogyakarta:PT LkiS Pelangi Aksara, 2015), 71.

⁹ Busriyanti, “Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Bi’ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, (Jurnal Fenomena, Vol. 15 No. 2, 2016)

1. Untuk mengetahui implementasi perda Kabupaten Pekalongan No. 3 Tahun 2020 dalam menangani kawasan rawan bencana banjir dan genangan(rob) di Kec. Siwalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari maqashid syariah pada penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dibidang hukum dalam mengupayakan perjuangan penyelamatan lingkungan berbasis islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai penegak hukum dapat berguna menambah wawasan, pengetahuan, pertimbangan, dan pengawasan terkait pelaksanaan hukum yang berlaku tentang penataan ruang. Dan bagi masyarakat dapat berguna sebagai penambah pengetahuan tentang penanganan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai langkah penanganan Kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob.

E. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pengertiannya, Kebijakan adalah sekumpulan rancangan konsep yang dijadikan sebagai rencana dasar pada pelaksanaan

keputusan yang dibuat oleh pemerintah maupun pejabat publik pembuat kebijakan yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh masyarakat¹⁰. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan proses pengejawantahan dari suatu kebijakan melalui pelaksanaan dan tindakan yang kongkrit, bentuk tersebut dapat dikatakan sebagai metode *Top Down* (atas-bawah).¹¹ Kebijakan dan implementasi merupakan satu rangkaian linier aktivitas pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat karena kebijakan merupakan suatu tahap merumuskan konsep atau pemikiran dengan metode *Button Up* (bawah-atas) yang mana prosesnya diawali dengan penyampaian aspirasi-aspirasi serta daya dukungan dari masyarakat.

Dapat dikatakan implementasi kebijakan adalah serangkaian tahapan administrasi setelah kebijakan itu telah disetujui dan ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif daerah. Implementasi kebijakan harus terdapat pola berpikir untuk menjabarkan dan menafsirkan beberapa kemungkinan yang sudah kongkrit maupun yang masih abstrak hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan yang mana tahap implementasi merupakan penentu dari keberhasilan kebijakan yang dijalankan di masyarakat luas.

¹⁰ Mansur J, "Implementasi Konsep dan Kebijakan Dalam Publik", (Jurnal Ekonomi Islam at-Tawassuth, Vol. VI, No. II, 2021), 327.

¹¹ Mansur J, "Implementasi Konsep dan Kebijakan Dalam Publik", (Jurnal Ekonomi Islam at-Tawassuth, Vol. VI, No. II, 2021), 324.

Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu : 1) kepentingan masyarakat sasaran yang terdapat dalam isi kebijakan; 2) manfaat isi kebijakan terhadap masyarakat sasaran; 3) perubahan yang hendak dituju pada sebuah kebijakan; 4) ketepatan dan efektivitas suatu program dalam kebijakan; 5) kerincian implementator pada pelaksanaan kebijakan; 6) pelaksanaan kebijakan yang didukung oleh sumber daya yang memadai¹².

Adapun implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan baik perorangan maupun kelompok privat atau kelompok publik yang mengarah kepada pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan sebelum pada tahap keputusan kebijakan¹³. Terdapat suatu model yang dikembangkan oleh Van Horn dan Van Meter yakni model *Top Down* dari yang dinamainya *A Model of the policy implementation process*, yang mana dalam model tersebut berisi enam aspek, yaitu : 1) Standar & arah kebijakan; 2) Sumber daya kebijakan; 3) komunikasi antarlembaga; 4) Karakter institusi pelaksana; 5) Kondisi ekonomi, sosial-politik; 6) Disposisi pelaksana¹⁴.

2. Maqashid Syariah

¹² Subarsono, “Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹³ Mansur J, “Implementasi Konsep dan Kebijakan Dalam Publik”, (Jurnal Ekonomi Islam at-Tawassuth, Vol. VI, No. II, 2021) , 331.

¹⁴ Wahab Solichin A, “Analisis Kebijaksanaan Publik”, (Malang: UMM Press, 2006).

Maqashid Syariah dinyatakan oleh Busyro (2010), adalah sebuah usaha yang dilakukan setiap insan menyiasati masalah guna memperoleh solusi dengan bertumpu pada ajaran agama Islam. Lanjutnya, untuk mengetahui maqashid syariah maka setiap insan dapat menggunakan akalannya dalam rangka menemukan hukum yang sebelumnya tidak atau belum diperintahkan dalam Al Qur'an dan Hadist selama dalam pengupayaannya mampu mendatangkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* dari mereka.

Dalam kitab *al Muwafaqat* karya Abu Ishaq al Syatibi yang dikutip Zahratul Idami menjelaskan bahwa maqashid syariah memiliki kandungan lima hal dalam tujuan hukum islam yang dijadikan sebagai tumpuan kemaslahatan, yaitu :

- *Hifdzu-din* (memelihara agama),
- *Hifdzu-nasf* (memelihara jiwa raga),
- *Hifdzu-'aql* (memelihara akal pikiran),
- *Hifdzu-nasab* (memelihara keturunan),
- *Hifdzu-mal* (memelihara harta benda).

al-Syatibi menjelaskan pula bahwa kemasalahatan agama dan dunia merupakan capaian yang utama dari adanya gagasan maqashid syariah dan apabila prinsip-prinsip tersebut tidak ditegakkan oleh manusia sebagai khalifah pemimpin di muka bumi, maka kemaslahatan di dunia niscya akan sirna atau bahkan tergantikan oleh kemafsadatan atau kerusakan

berupa bencana-bencana yang mampu menghilangkan kenikmatan dalam menjalankan hidup di dunia¹⁵. Maka dari itu secara definitif, Maqashid syariah adalah sebuah alat untuk menganalisis dari apa yang diperintahkan (hukum/*policy*) guna mengetahui implikasi dari kemaslahatan-kemasalahatan syar'i pada pemberlakuannya¹⁶.

Sebagai upaya pengembangan *scient development Islamic law*, kontribusi dalam memberikan kejelasan terhadap berbagai varian persoalan dalam hukum kontemporer, para *mujtahid* dituntut untuk mampu menguasai pentasyri'an hukum dalam islam itu sendiri tujuannya untuk memberi pemahaman mutlak bahwasanya apakah hukum terdahulu masih relevan untuk diberlakukan atau justru tak dapat berlaku lagi karena adanya perubahan struktur sosial¹⁷.

Kemudian berkaitan dengan hal itu, pemikir Jasser Auda berpendapat bahwa upaya menggagas reformasi pemahaman hukum islam yang disetarakan dengan obyek dari ilmu perkembangan ilmu pengetahuan modern, merupakan sebuah tatangan spekulatif dalam dunia islam demi

¹⁵Yunita, Idami Z. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqih", (Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 15 No. 2, 2020), 218.

¹⁶ Halil Tahrir, "Ijtihad Maqashidi (Rekonsturksi Hukum Islam berbasis Interkoneksitas Masalah)", (Yogyakarta:PT LkiS Pelangi Aksara, 2015).

¹⁷ Halil Tahrir, "Ijtihad Maqashidi (Rekonsturksi Hukum Islam berbasis Interkoneksitas Masalah)", (Yogyakarta:PT LkiS Pelangi Aksara, 2015).

memelihara dan mengembangkan khazanah keilmuan islam yang bersifat dinamis terhadap realitas sehari-hari¹⁸.

Dalam konteks ini, Jasser Auda menjadikan Maqashid Syariah sebagai basis pangkal berpikir dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya. Terdapat 6 (enam) fitur yang di optimalkan beliau diantaranya : 1) kognisi dari pemikiran keagamaan; 2) kemenyeluruhan; 3) keterbukaan; 4) hierarki berpikir yang saling mempengaruhi; 5) interkoneksi; 6) kebermaksudan¹⁹.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian milik Zahara dan Nengyanti, 2019 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Rangka Alih Fungsi Lahan Rawa Sebagai Pengurangan Risiko Banjir Di Kota Palembang”. Dukung masalah dalam penelitian ini ialah upaya konservasi, budidaya, dan reklamasi yang dimanfaatkan menjadi daerah resapan air dan pemenuhan kecukupan lahan terbangun di Kota Palembang yang masih belum maksimal. perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan tentang optimalisasi fungsi rawa untuk meminimalisir

¹⁸ Auda Jasser, “Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah”, (Bandung : Mizan, 2015).

¹⁹ Auda Jasser, “Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah”, (Bandung : Mizan, 2015).

banjir. Sedangkan peneliti membahas penanganan rawan bencana banjir dan genangan dan dilihat dari cara pandang keislaman²⁰.

2. Penelitian milik Rizky Pandapotan Sembiring, Untung Sri Hardjanto, Sekar Anggun Gading, 2019 dengan judul “Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Duda masalah dalam penelitian ini ialah proses pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang daerah belum efektif dan terkendala oleh proses pembebasan lahan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan peraturan agar sesuai dan efektif. Meskipun sama-sama membahas tentang penanggulangan banjir dan rob, penelitian ini tentu berbeda dengan milik peneliti, yaitu pada metode yang digunakan yuridis empiris, tempat/lokasi penelitian di Siwalan Kabupaten Pekalongan dan juga menggunakan sudut pandang maqashid syariah²¹ ..

3. Penelitian milik Melinda Eskawati Usman dan Muhammad Yaasiin Raya, 2020 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris/sosiologis dikarenakan

²⁰ Zahara dan Nengyanti, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dalam Rangka Alih Fungsi Lahan Rawa sebagai Pengurangan Risiko Banjir di Kota Palembang", (Demography Journal of Sriwijaya Vol. 3. No. 1, 2019).

²¹ Sembiring, Rizky Pandapotan, dkk. "Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031" (Diponegoro Law Jurnal. Vol. 8. No. 1, 2019).

penelitian tersebut bertolak dari data primer yang didapat dari lapangan melalui penelitian terjun langsung ke masyarakat. Penelitian tersebut berusaha meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Gowa dan bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan terhadap korban bencana banjir yang kerap terjadi akibat tingkat elevasi yang rendah di sekitar kawasan pesisir dan alih fungsi lahan yang berpotensi meningkatkan resiko banjir di Kecamatan Pallanga. Penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2020 dan membahas mengenai efektivitas Perda No.1 Tahun 2018 Kab. Gowa dalam menangani permasalahan banjir²².

4. Penelitian milik Lailatul Magfiroh dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak Dalam Menangani Banjir Rob Di Desa Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” penelitian ini mengkaji upaya pemkab demak dalam pengelolaan penanaman magrove, perbaikan jalan, pembuatan terumbu karang yang tidak dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini termasuk kedalam jenis yuridis empiris, data utama didapat melalui wawancara kepada pemkab demak. Adapun perbedaannya dengan milik peneliti yaitu beliau tidak menggunakan teori maqashid syariah dalam menganalisisnya.
5. Penelitian milik Fitroh Briliano Sarasati, 2020 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah”. Penelitian ini

²² Sarasati Fitroh B, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Desa Kertosari Kalibening”, (Yogyakarta : STPMD, 2020).

termasuk tipe penelitian yuridis empiris, karena obyek yang di teliti berada di lokasi Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Bnjarnegara. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dan pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian tersebut berusaha mengetahui kebijakan dan implementasi daripada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara yang mana daerah tersebut berada di dataran tinggi, sehingga potensi bencana yang timbul yakni bencana tanah longsor. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada lokasi di Kabupaten Banjarnegara, dan pada penggunaan teorinya tidak menyuguhkan dari perpektif Maqashid Syariah sebagai sudut pandang dalam penulisan.

6. Penelitian milik Ahmad Masyhadi, 2021 dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Reklamasi Pesisir Pantai Jakarta”. Isu masalah pada penelitian ini terkait pembangunan reklamasi pesisir jakarta yang menuai kontroversi antara pemda dengan masyarakat sekitar. Penggunaan studi kepustakaan dengan meninjau teori maqashid syariah telah digunakan dalam penelitian ini. penelitian ini berlokasi di DKI Jakarta dan itu lah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan milik peneliti (Kabupaten Pekalongan)²³.

Berdasarkan Penelitian relevan sebagaimana yang telah disajikan diatas sesungguhnya memiliki arti dan maksud bahwasannya fenomena bencana adalah fenomena yang penting untuk dipelajari dan penting untuk

²³ Masyhadi Ahmad, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Reklamasi Pesisir Pantai Jakarta”, (Madinah : Jurnal Studi Islam Vol. 8 No. 2).

dijadikan sebagai bahan penelitian ilmiah bagi kalangan akademisi. Dan hal yang menjadi pembeda diantara variabel penelitian diatas dengan milik peneliti ialah penelitian yang disuguhkan berupa mengkaji perspektif maqashid syariah yang diinterkoneksi dengan upaya penjagaan lingkungan (*hifdzu- Bi'ah*).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah rangkaian teknik atau tahap-tahap yang sistematis dilakukan oleh seorang peneliti demi mendapatkan satu kesimpulan pengetahuan ilmiah. Dan pada umumnya pemahasan tentang metode penelitian mengacu pada bentuk-bentuk penelitian, tujuan penelitian, sifat masalah, dan pendekatannya²⁴.

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah metode pada penelitian yang memiliki ruang lingkup kajian tentang hukum yang sedang berjalan di masyarakat²⁵. Dalam karyanya Muhaimin (2020), secara akademis penelitian yuridis empiris hanya mengkaji ketika hukum yang sedang berjalan mampu menimbulkan suatu gejala yang berkaitan dengan hubungan sosial atau dalam pemahaman lain penelitian yuridis

²⁴ Suryana, "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Bandung: UPI, 2010), 20.

²⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (NTB: UPT Mataram University, 2020), 80.

empiris lebih menitikberatkan pada pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum²⁶.

Pada tahap aplikasinya, untuk memaparkan bagaimana implementasi perda dalam penanganan banjir dan genangan yang terdapat di Kecamatan Siwalan diperlukan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena dari fenomena banjir dan genangan yang timbul Di Kecamatan Siwalan memberikan dampak publik dan jelas itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Adapun untuk menggali data berupa (*field reserach*) melalui wawancara, kuisioner, dan observasi²⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam memahami permasalahan implementasi penanganan banjir dan genangan (rob) di Kecamatan Siwalan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah usaha untuk menguraikan problem penelitian dengan didekatkan atau dianalisis dari segi kualitas data²⁸. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer di Dinas Putaru Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Siwalan yang mana terhadap penelitian ini adalah bagaimana penanganan banjir yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan.

3. Fokus Penelitian

²⁶ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 83.

²⁷ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 90.

²⁸ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 106.

Fungsi dari fokus penelitian yaitu agar suatu permasalahan yang diteliti memiliki limitasi dari konteks penelitian sehingga ketika proses pengambilan data penulis tidak mengalami kebingungan sewaktu memilah informasi dari data yang didapatkan.

Penelitian ini berfokus pada teknis pelaksanaan aturan pemerintah daerah dari aspek penataan ruang yang patut di pertanyakan, karena fakta sosial yang menyajikan fenomena banjir hingga menyebabkan kerusakan lahan, sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Siwalan. Adapun terdapat fokus dari pandangan lain yaitu dari maqashid syariah yang mendeskripsikan bagaimana pentingnya penanganan bencana banjir dan genangan rob agar terhindar dari segala kerusakan yang disebabkan. Pemilihan fokus penelitian ini berdasarkan dari segi teknis dan segi kebijakan yang dilakukan yang mana dalam hal ini mengacu pada Perda Kabupaten Pekalongan. 3 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2040.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam penelitian yuridis empiris. Sebab, data utama yang digunakan berasal dari wawancara dan observasi. Maka dari itu jika seorang peneliti akan melakukan observasi awal, baiknya disesuaikan dahulu dimana tempat dan letak lokasi yang dijadikan sebagai sumber data awal yang akan dipertimbangkan dalam penulisan skripsi²⁹

²⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (NTB: UPT Mataram University, 2020), 92.

Dalam pengaplikasiannya, lokasi wawancara dilakukan di tiga tempat, yaitu :

- Kantor Dputaru (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kabupaten Pekalongan,
- Kantor Bappeda Kabupaten Pekalongan
- Kantor Kecamatan Siwalan.

5. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis sumber yang dapat digunakan pada penelitian ini yang meliputi :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer di penelitian yuridis empiris diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Hasil dari observasi dan wawancara tersebut maka dapat dijadikan sebagai data utama dalam penelitian yuridis empiris³⁰.

Dalam pengaplikasiannya, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena dan gejala yang terjadi di Kecamatan Siwalan, Desa Depok, Desa Blimbingwuluh, Desa Boyoteluk, dan Desa Blacanan. Kemudian peneliti melakukan wawancara pada kantor dinas yang terkait dan dari hasil wawancara itulah yang disajikan sebagai data primer dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menggunakan studi kepustakaan yakni dengan mengakumulasikan dan mendokumentasikan informasi yang

³⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (NTB: UPT Mataram University, 2020), 89.

berasal dari buku, undang-undang, jurnal, artikel, *legal opinion*, maupun kamus³¹.

6. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat diantaranya 2 (dua) teknik yang bisa di gunakan untuk mengumpulkan data yaitu primer dan sekunder. Teknik Primer berupa observasi dan wawancara dengan narasumber/informan yang masih berkorelasi pada konteks penelitian. Sedangkan teknik sekunder berupadengan mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal,hukum, dan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya³².

7. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dilaksanakan ketika peneliti telah mendapatkan dan mengumpulkan beberapa data yang cukup kemudian diuraikan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan fokus perkaranya. Sesuai dengan penjelasan Muhaimin (2020), bahwa teknik analisis data ialah usaha untuk menjabarkan, menelaah data dengan mempertimbangkan teori-teori yang telah dikonsep sebelumnya sehingga menghasilkan kesimpulan dengan wujud struktur kalimat yang baik dan benar³³.

³¹ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 101.

³² Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020), 101.

³³ Analisis data yang diuraikan merupakan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif hukum yang mana hasil kesimpulan dari data disajikan dalam bentuk dekriptif sebab pendekatan ini lebih menitik beratkan pada aspek kualitas data yang telah didapat. periksa, Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (NTB: UPT Mataram University, 2020),105.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yang melingkupi empat bagian yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Dalam pengaplikasian analisis data, dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Kemudian dilakukanlah tahap selanjutnya yaitu reduksi data dalam rangka menyederhanakan, meringkas, membuang hal yang tidak diperlukan, dan mempertegas data yang berasal dari pengumpulan data. Ketika sudah dilakukan reduksi data selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat deskriptif, dan penyajian data yang berasal dari wawancara dapat dipaparkan melalui transkrip dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hingga pada akhirnya penelitian tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta dari hasil penelitian yang disajikan.

8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menyantumkan sistematika penulisan yang berfungsi untuk memberikan penjabaran yang sistematis

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, penelitian relevan, dan metode penelitian³⁴.

b. BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN MAQASHID SYARIAH

³⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (NTB: UPT Mataram University, 2020).36

1) Teori Impementasi Kebijakan

Bab ini berisi deskripsi teori implementasi kebijakan yang digunakan sebagai tinjauan umum untuk meninjau dari segi kepustakaan terkait fokus penelitian.

2) Teori Maqashid Syariah

Bab ini menyajikan teori atau konsep yang berfungsi sebagai tinjauan umum untuk berpikir dari segi kepustakaan terkait fokus penelitian.

c. BAB III PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN GENANGAN DI KECAMATAN SIWALAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data transkrip yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber.

d. BAB IV ANALISIS PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN GENANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan yang dengan mengkolaborasikan teori yang sudah ditentukan pada bab 2.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kalimat kesimpulan dari penjelasan sebelumnya secara, padat dan jelas dari peneliti atas analisis yang telah dilakukannya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya terkait implementasi Perda Kab. Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-2040 dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan perspektif Maqashid Syariah (studi kasus Di Kecamatan Siwalan), maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi Perda Kab. Pekalongan No. 3 Th. 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-2040 cukup baik dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yakni melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bidang PSDA). Sejauh ini implementasi kebijakan yang sedang dilaksanakan yakni program pembangunan tanggul pengendalian banjir yang dibangun di Desa Depok, Kecamatan Siwalan. Akan tetapi, terdapat satu permasalahan yang membuat implementasi itu terjadi terhambat, yakni pada pelaksanaannya yang mundur karena terdapat pengalihan prioritas dana Covid-19 pada tahun 2019-2020. Selain itu, yang menjadi faktor penghambat implementasi penanganan banjir dan rob juga terletak pada sumber daya finansial pada program pembangunan tanggul pengendalian banjir yang ada di Desa Depok. Program tersebut digarap secara bertahap karena sumber daya finansial yang digunakan hanya bergantung pada APBD Kab. Pekalongan. Jadi pada keseluruhannya implementasi kebijakan terhadap penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan mampu dilaksanakan dengan baik namun pada proses kinerjanya tidak dilaksanakan dengan optimal.

Pada kajian maqashid syariah, terkait dengan pemberlakuan kebijakan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 telah ditemukan beberapa fitur-fitur yang terdapat didalam maqashid syariah diantaranya : a). fitur kognisi yang telah diupayakan oleh implementator kebijakan dalam mengupayakan penanganan banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan. Dari kemampuan watak kognisi implementatorlah yang dapat melahirkan beberapa rencana program yang tepat untuk dilaksanakan. b). Eksistensi fitur Keterbukaan dapat dimunculkan dari implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 yakni melalui pelaksanaan rapat pertimbangan program prioritas pembangunan jangka pendek melalui Musrenbang yang dihadiri dari berbagai penjurur desa/kelurahan Di Kecamatan Siwalan c). Fitur kebermaksudan yang diyakini peneliti telah terbukti keberadaannya yakni dalam pelaksanaan penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan yang mampu menghadirkan kemaslahatan lingkungan melalui upaya pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan genangan rob yang melanda di Kecamatan Siwalan.

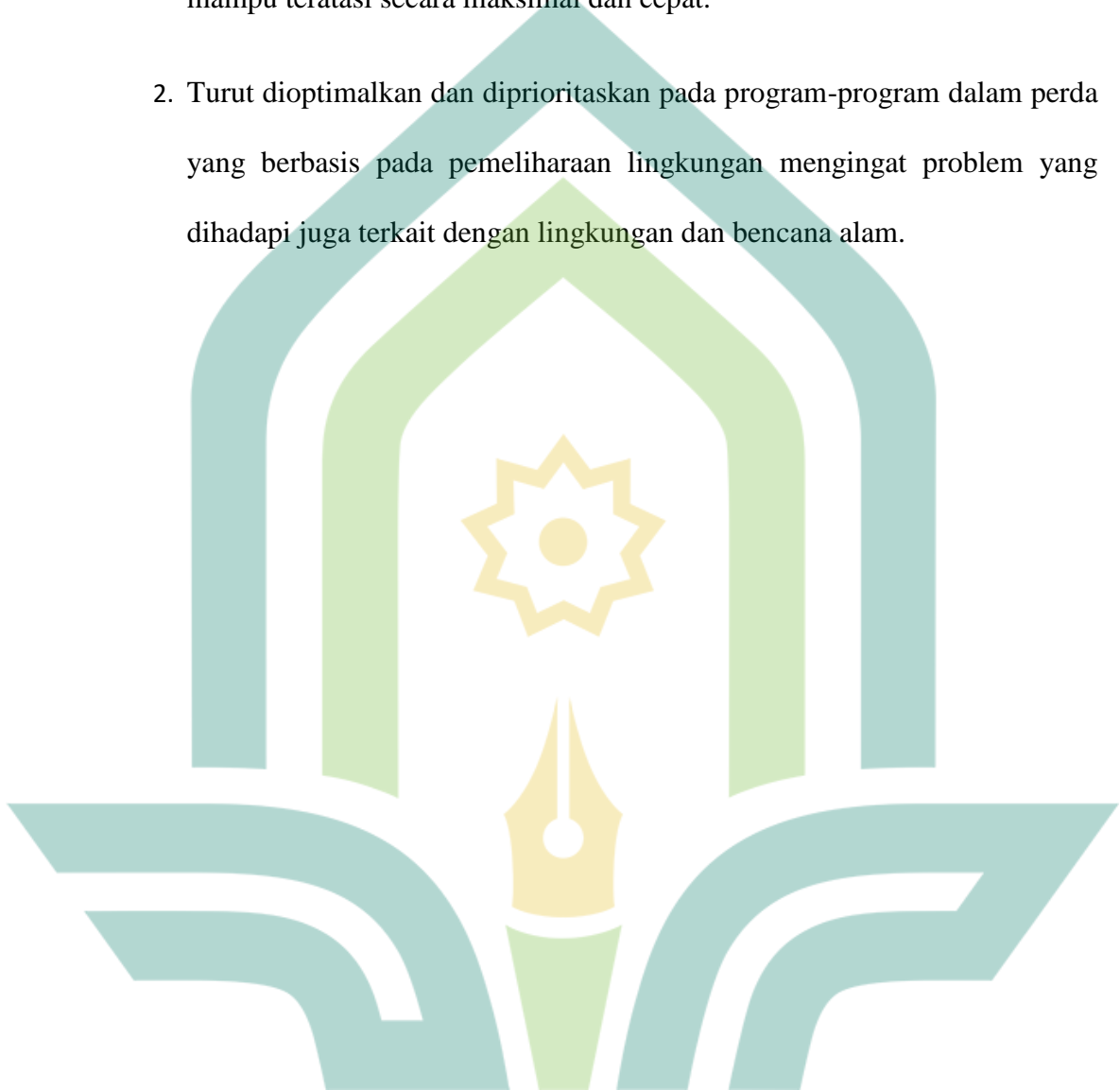
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti juga turut menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan bagi tiap-tiap kebijakan yang belum diimplementasikan mengenai pengusulan bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dengan alasan agar upaya penanganan kawasan rawan banjir dan genangan pada program pembangunan tanggul pengendalian banjir mampu dilaksanakan secara komprehensif dan optimal, sehingga pengentasan permasalahan tentang bencana banjir dan genangan rob mampu teratasi secara maksimal dan cepat.

2. Turut dioptimalkan dan diprioritaskan pada program-program dalam perda yang berbasis pada pemeliharaan lingkungan mengingat problem yang dihadapi juga terkait dengan lingkungan dan bencana alam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahhab Khallaf. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Auda Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung : Mizan.
- Ahmad Khusairi. 2014. *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta:Kencana.
- BNPB. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Mitigasi.
- Jauhar Ahmad al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Kristianto, A. 2010. *Seri Tanggap Bencana Alam Banjir*. Bandung: Angkasa.
- Majid An-Najjar Abdul. 2018. *Maqashid asy Syariah bi Ab'ad Jadidiah*. Beirut: Dar al-Garab Al-Islami.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: UPT Mataram University.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim. 2017. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Depok: Rajawali Pers.

Parlindungan, A.P. 1993. *Komentar Atas Undang-undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju.

Purwanto. *Awas Banjir*. 2008. Jakarta: PT Pustaka Grafiti.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subarsono A. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono A. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu Sosial UNPAD.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Anggun, Brilianty, Popy. 2021. *Implikasi Penanmbangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah Di Desa*

Bolosingo Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Budiyarto, Aries Bustami. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendalian Rob dan Banjir Dalam Penataan Ruang di Kota Semarang Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Dian, Haris, Nugraha. 2021. *Implementasi Penanggulangan Banjir Rob Melalui Penyelenggaraan Drainase Di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Pontianak: Pascasarjana IPDN Jatinangor.

Halil Tahrir. 2015. *Ijtihad Maqashidi (Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Masalah)*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.

Magfiroh, Lailatul. 2018. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak Dalam Menangani Banjir Rob Di Desa Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Skripsi Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Sarasati Fitroh B. 2020. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Di Desa Kertosari, Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara)*. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pengembangan Masyarakat Desa.

JURNAL

- Budiman S. 2017. *Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik : Studi Pembentukan UU Nomor. 14 Tahun 2008*. JIKH Vol. 11 No. 2.
- Busriyanti. 2016. *Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Fenomena. Vol. 15 No. 2
- Fakultas Syariah IAIN PEKALONGAN. 2020. *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PEKALONGAN*. Pekalongan.
- Maani K. D,& Kurniawan W. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donal Van Meter dan Carl Van Horn*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). VOL. 1 No.4
- Mansur J. 2021. *Implementasi Konsep dan Kebijakan Dalam Publik*. Jurnal Ekonomi Islam at Tawassuth. Vol. VI, No. II.
- Melinda E, Yasiin M. 2020. *Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga*. Allauddin Law Development Journal, Vol. 2 No. 3.
- Masyhadi, Ahmad. 2021. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Reklamasi Pesisir Pantai Jakarta*. Madinah: Jurnal Studi Islam Vol. 8 No. 1
- Nashrullah, S., dkk. 2013. *Study on Flood Inundation in Pekalongan, Central Java*. International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences. Vol. 10, No. 2.

Rosando, Abraham Ferry, Herry Widhiarto, dan Amanda Raissa. 2020. *Aspek Hukum Dalam Mitigasi Bencana di Masyarakat Desa Senopo Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community. Vol. 2. No.1

Sembiring, Rizky Pandapotan, dkk. 2019. Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 8. No. 1.

Situmorang Chazali. 2016. "*Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*". Jurnal Administrasi Publik: Yogyakarta Vol.6 No.2.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Ubaidillah. Hasan. Fiqh Bi'ah (Formulasi Konsep Maqashid Syariah dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan), Al Qanun. 2010. Vol.13. No.1

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 2018. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. At-Turas, Vol. V, No. 1.

Yunita, Idami Z. 2020. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Vol. 15. No. 2

Zahara dan Nengyanti. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dalam Rangka Alih Fungsi Lahan Rawa sebagai Pengurangan Risiko Banjir di Kota Palembang*. Demography Journal of Sriwijaya. Vol. 3. No. 1.

KETENTUAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.

Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan

WEBSITE

<https://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/banjir-kepung-kecamatan-siwalan-pekalongan-polisi-bujuk-warga-untuk-mau-dievakuasi> (Diakses 12 Februari 2022 pukul 15:40 WIB)

<https://radarpekalongan.co.id/143699/banjir-rob-tak-tertangani-potensi-kerugian-rp1764-triliun/> (Diakses pada pukul 15:38, 12 Februari 2022)

<https://pekalongankab.go.id/v3/public/web/> (diakses 3 Maret 2022 pukul 14:30 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Siwalan,_Pekalongan (diakses 4 Maret 2022 Pukul 15:00 WIB)

<https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/02/07/13-desadi-siwalan-pekalongan-terendam-banjir?page=2> (diakses 7 Maret 2022 pukul 07:30 WIB)

QUR'AN KEMENAG.2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/7/85>

QUR'AN KEMENAG.2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/32>

QUR'AN KEMENAG.2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/5>

WAWANCARA

1. Dputaru Kab. Pekalongan

Al Faruq, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan,
14 Oktober 2022

Budi Antoyo, Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan,
14 Oktober 2022

Fajar, Staff Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan,
14 Oktober 2022

Siswanto, Kepala Kecamatan Siwalan, Wawancara Pribadi, Siwalan,
19 September 2022

Teguh Wuryanto, Ahli Muda Teknik Pengairan Bidang PSDA Dinas PUPR Kab.
Pekalongan, 14 Oktober 2022

Wawan, Staff Bidang Bina Marga Dinas PUPR, 14 Oktober 2022

2. Masyarakat Kecamatan Siwalan

Bambang, Warga Kecamatan Siwalan, 2 Oktober 2022

Suprayitno, Warga Desa Depok, 5 Oktober 2022

Turino, Warga Kecamatan Siwalan, 2 Oktober 2022

Dokumentasi Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-982/In.30/TU.I.1/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

17 Oktober 2022

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan

Di Jl. Singosari, No. 1, Nyamok, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, 51161

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Moh. Hisyam Maulana
NIM : 1517041
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir Dan Genangan Perspektif Maqashid Syariah"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh.

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSS) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

JAS-ANZ





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

BLANKO PENGESAHAN JUDUL DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOH. HISYAM MAULANA
NIM : 1517041
Smt./Jurusan : 10/Hukum Tatanegara

Dengan ini mengajukan judul proposal skripsi:

Judul : : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN GENANGAN DI KECAMATAN SIWALAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 Kabupaten Pekalongan dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan di Kecamatan Siwalan?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 Kabupaten Pekalongan dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan perspektif maqashid syariah?

Nama Mahasiswa

Moh. Hisyam Maulana
NIM.1517041

Pekalongan, 14 Februari 2022

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan,

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP.190306132015032004

Sekretaris Jurusan,

Jumailah, S.H.I., M.SI
NIP.19830518201608 D2 099

Pembimbing Skripsi:

Dr. Ali Mukhtarom, M.H.I



Terima Kasih

Hai Terimakasih telah mengisi form pendataan penelitian di Kabupaten Pekalongan. dengan anda melakukan penelitian di Kabupaten Pekalongan anda telah memberikan kontribusi yang besar untuk pemerintah daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan keahlian. semoga penelitian yang anda lakukan lancar dan berhasil tepat waktu.

Info Tentang Penelitian dan Pengembangan di Kab. Pekalongan

BAPPEDA LITBANG Kab. Pekalongan
Jl. Krakatau 9, Kajen, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah, Indonesia

(0285) 381456, (0285) 3801010

<https://bappedalitbang.pekalongankab.go.id/>

Kembali Form Pendataan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Hisyam Maulana
NIM : 157041
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
E-mail address : hisyammaulana2015new@gmail.com
No. Hp : 082243370921

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penanganan Kawasan Rawan Banjir dan Genangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda
(Studi Kasus Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Desember 2022



)
nama terang dan tanda tangan penulis
(Moh. Hisyam Maulana)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD